

**PERIZINAN OBAT GENERIK YANG MENGANDUNG
ZAT PSIKOTROPIKA DI APOTEK
(Studi pada Apotek Surakarta)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Progam Studi Strata 1 pada
Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

Oleh :

BREGAS CINDHE NUGROHO

C100160106

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERTAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERIZINAN OBAT GENERIK YANG MENGANDUNG
ZAT PSIKOTROPIKA DI APOTEK**

(Studi pada Apotek Surakarta)

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

BEGAS CINDHE NUGROHO

C100160106

Telah diperiksa dan dsetujui untuk diuji oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Rizka' with a stylized flourish at the end.

(Dr. Rizka S.Ag., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN



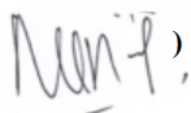
**PERIZINAN OBAT GENERIK YANG MENGANDUNG ZAT
PSIKOTROPIKA DI APOTEK
(Studi pada Apotek Surakarta)**

**OLEH
BREGAS CINDHE NUGROHO
C100160106**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Sabtu, 24 Juli 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji :

- 1 Dr. Rizka, S.Ag., M.H.
(Ketua Dewan Penguji)**
- 2 Prof. Dr. Harun, S.H., M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)**
- 3 Nunik Nurhayati, S.H., M.H.
(Anggota II Dewan Penguji)**

()
()
()

Dekan



Dr. Kefik Wardiono, S.H., M.H.

NIP. 196812261993031002 / NIDN. 0026126801

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Publikasi Ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis ataupun diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam makalah dan disebutkan dalam daftar pustaka

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya

Surakarta, 24 Juli 2021

Penulis



BREGAS CINDHE NUGROHO.

C100160106

PERIZINAN OBAT GENERIK YANG MENGANDUNG ZAT PSIKOTROPIKA DI APOTEK (Studi pada Apotek Surakarta)

Abstrak

Kesehatan merupakan salah satu hal penting yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas hidup manusia dibidang kesehatan merupakan usaha menyeluruh yang menjadi tanggung jawab bersama baik peningkatan kesehatan secara fisik maupun non-fisik yang menyeluruh bagi masyarakat. Salah satu komponen penting dalam memelihara kesehatan adalah Obat, ketersediaan obat sebagai salah satu komponen utama dalam peran menjaga kesehatan masyarakat haruslah diperhatikan dengan baik mengingat kegunaan utama obat adalah memelihara kesehatan, memulihkan atau menyelamatkan jiwa. Dalam peredarannya, pemerintah telah meregulasi tentang proses peredaran Obat yang ada dimasyarakat. Agar peredaran obat dapat teregulasi dengan baik dan tidak disalahgunakan oknum tidak bertanggung jawab yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat sendiri. Akan tetapi masih banyak ditemui dilingkungan masyarakat yang tidak memperdulikan larangan tersebut demi kepentingan pribadi. Masih saja terjadi kasus pengedaran obat-obat illegal dengan berbagai cara. Masalah peredaran obat illegal menjadi persoalan serius di dunia kesehatan. Ketersediaan informasi tentang obat illegal karena kekurangan informasi dan kurangnya referensi tentang peredaran obat-obatan ilegal. Kurangnya informasi tentang akibat-akibat yang ditimbulkan karena adanya peredaran obat illegal dan sanksi yang mereka terima apabila mengedarkan obat-obatan illegal tersebut juga mempengaruhi tindakan ini.

Kata Kunci : Obat, Perizinan, Psikotropika

Abstract

Health is one of the important things needed by the human body. Efforts to maintain and improve the quality of human life in the health sector are a comprehensive effort that is a shared responsibility both to improve overall physical and non-physical health for the community. One of the important components in maintaining health is medicine, the availability of medicine as one of the main components in the role of maintaining public health must be considered properly considering the main use of medicine is to maintain health, restore or save lives. In its circulation, the government has regulated the process of circulating drugs in the community. So that the circulation of drugs can be regulated properly and not misused by irresponsible persons which will ultimately harm the community itself. However, there are still many people who do not care about the prohibition for personal gain. There are still cases of trafficking illegal drugs in various ways. The problem of illegal drug trafficking is a serious problem in the world of health. Availability of information about illegal drugs due to lack of information and lack of references about the circulation of illegal drugs. Lack of information about the consequences caused by the circulation of illegal drugs and the sanctions they receive when distributing these illegal drugs also affect this action.

Keywords: Drugs, Licensing, Psychotropics

1. PENDAHULUAN

Upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas hidup manusia dibidang kesehatan merupakan usaha menyeluruh yang menjadi tanggung jawab bersama baik peningkatan kesehatan secara fisik maupun non-fisik yang menyeluruh bagi masyarakat. Pembangunan kesehatan merupakan salah satu unsur dari kesejahteraan umum yang harus diwujudkan oleh Pemerintah sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dicantumkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu “..... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan , perdamaian abadi dan keadilan sosial... (Asyhadie, 2017)”.

Salah satu komponen penting dalam memelihara kesehatan adalah Obat, ketersediaan obat sebagai salah satu komponen utama dalam peran menjaga kesehatan masyarakat haruslah diperhatikan dengan baik mengingat kegunaan utama obat adalah memelihara kesehatan, memulihkan atau menyelamatkan jiwa. Dalam peredarannya, pemerintah telah meregulasi tentang proses peredaran Obat yang ada dimasyarakat. Agar peredaran obat dapat teregulasi dengan baik dan tidak disalahgunakan oknum tidak bertanggung jawab yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat sendiri.

Pengawasan terhadap peredaran obat penting dilakukan, mengingat banyak kasus yang terjadi dimasyarakat yang berhubungan dengan penyalahgunaan obat maupun penggunaan yang salah, contoh kasus telah ditemukan di Wonogiri penyalahgunaan resep Apotek untuk disalahgunakan menjadi tempat peredaran narkotika, maupun obat keras menjadi modus baru. Dalam kasus tersebut telah ditemukan fakta bahwa selama tahun 2018 terdapat 24 kasus narkotika dan daftar obat golongan G (obat keras) yang telah ditangani oleh Polres Wonogiri dan jumlahnya meningkat dalam kurun tahun 2019. Diketahui sumber dari peredaran obat keras tersebut tidak lain dari Apotek dan toko obat.

Penggunaan narkotika dan psikotropika hanya dapat dilakukan oleh tenaga farmasi berdasarkan resep dokter atau dokter gigi dan dilarang untuk disalahgunakan. setiap orang yang memproduksi, menyimpan, mengedarkan dan

menggunakan narkotika dan psikotropika wajib memenuhi standar dan/persyaratan tertentu (Notoatmodjo,2010).

Akan tetapi masih banyak ditemui dilingkungan masyarakat yang tidak memperdulikan larangan tersebut demi kepentingan pribadi. Masih saja terjadi kasus peredaran obat-obat ilegal dengan berbagai cara. Masalah peredaran obat ilegal menjadi persoalan serius di dunia kesehatan. Ketersediaan informasi tentang obat ilegal karena kekurangan informasi dan kurangnya referensi tentang peredaran obat-obatan ilegal. Kurangnya informasi tentang akibat-akibat yang ditimbulkan karena adanya peredaran obat ilegal dan sanksi yang mereka terima apabila mengedarkan obat-obatan ilegal tersebut juga mempengaruhi tindakan ini.

Maka dari itu penulis mencoba meneliti tentang unsur-unsur yang termasuk dalam perbuatan peredaran obat ilegal dan bagaimana dampak peredaran obat-obatan ilegal agar masyarakat dapat mengetahui hal tersebut. Ketersediaan informasi tentang obat ilegal dan ancaman bahayanya sangat diperlukan untuk mendukung komitmen perang terhadap obat ilegal dengan melibatkan partisipasi semua pihak. Keterlibatan aktif ini perlu ditumbuhkan dengan informasi yang lengkap agar semua stake holder (pemegang saham), termasuk masyarakat dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam mewaspadaai, menyadari bahaya dan melawan maraknya peredaran obat ilegal.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu prosedur untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan-lapangan (Suratman dan Dillah, 2013).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Izin Terhadap Peredaran Obat-Obat Generik Yang Mengandung Zat Psikotropika

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara

dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

Sediaan farmasi merupakan bagian penting dalam mewujudkan kesehatan nasional, dalam hal ini melalui subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. meliputi berbagai kegiatan untuk menjamin: aspek keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan yang beredar, ketersediaan; ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial; perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat; penggunaan obat yang rasional; serta upaya kemandirian dibidang kefarmasian melalui pemanfaatan sumber daya negeri.

Wujud pelayanan kesehatan dari pemerintah secara *promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif* dalam undang-undang kesehatan memberikan penjelasan sebagai berikut :

- a. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
- b. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.
- c. Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
- d. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Industri farmasi dan importir obat dan obat tradisional memiliki kewajiban dan tanggung jawab memberikan informasi yang benar dalam bentuk keterangan yang tercantum pada wadah atau kemasan setiap produknya, yaitu komponen pokok obat dan obat tradisional, indikasi, cara penggunaan, tanda peringatan atau efek samping, dan tanggal kadaluwarsa. Industri farmasi memiliki kewajiban dan tanggung jawab

dalam memberikan informasi yang akurat mengenai produknya kepada profesi kesehatan, khususnya dalam penggunaan obat etikal yang tepat.

Dalam undang-undang kesehatan memberikan penjelasan mengenai obat sebagai berikut :

“Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia”

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis didapatkan hasil yang sesuai dari isi wawancara dengan kajian teori yang dilakukan oleh penulis. Obat-obat psikotropika adalah obat golongan keras yang ditandai dengan tanda K dalam kemasan, Obat-obat psikotropika menurut undang-undang psikotropika terdiri dari beberapa golongan yang mana semua golongan dari jenis obat psikotropika tidak boleh beredar secara sembarangan dimasyarakat. Tetapi dalam hal larangan peredaran obat keras khususnya psikotropika dapat menjadi pengecualian dengan kriteria tertentu yang diatur dalam undang-undang. Untuk hal ini kegunaan obat psikotropika hanya boleh digunakan untuk kegunaan ilmu pengetahuan. Sementara untuk proses pengobatan, obat psikotropika haruslah terdaftar dalam departemen yang mengatur. Dalam produksinya, produsen pabrik yang hendak memproduksi obat psikotropikan haruslah memiliki izin edar yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.

Menurut Undang-undnag OOT (Obat-obat Tertentu) Obat-Obat Tertentu adalah obat yang bekerja disistem susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku .

Sedangkan untuk Obat-Obat Tertentu pengelolaannya menurut PerBPOM No 28 Tahun 2018 sepenuhnya telah dipegang oleh pada Industri Farmasi dan PBF (Pedagang Besar Farmasi), fasilitas pelayanan kefarmasian dilarang menyerahkan Obat-Obat Tertentu yang mengandung Dekstrometorfan kepada anak berusia dibawah 18 tahun, serta dalam melakukan kegiatan penyerahan

Obat-Obat Tertentu haruslah memperhatikan: kewajaran jumlah obat yang akan diserahkan; dan frekuensi penyerahan obat kepada pasien yang sama.

Fasilitas Pelayanan Kefarmasian wajib mengarsipkan secara terpisah seluruh dokumen yang berhubungan dengan pengelolaan Obat-obat Tertentu. Dalam peraturan tersebut, BPOM telah memberikan peraturan tersendiri mengenai jenis obat ini yang mana dalam pasal 2 tercantum tentang kriteria Obat-obat tertentu yang dikatan suatu obat mengandung zat yang bernama: tramado; triheksifenidil klorpromazin; amitriptilin; haloperidol dan/atau dekstrometorfan.

3.2 Dampak Peredaran Obat Generik Ilegal Di Masyarakat

Untuk pengawasan dan perizinan peredaran obat yang mengandung zat psikotropika maupun obat-obat tertentu (OOT) dan obat-obatan yang tertulis logo K (keras) dikemasan, Narasumber memberikan keterangan bahwa pihak produsen pembuatan obat juga memberikan perlindungan kepada konsumen dengan cara membatasi jumlah obat yang diproduksi dan menambahkan beberapa keterangan tambahan dalam kemasan obat, seperti anjuran pemakaian, kandungan zat psikotropika yang diperjelas. Adapun setiap apotek atau klinik yang ingin menyediakan obat-obat tertentu haruslah memiliki izin tertentu dari BPOM, dan wajib melaporkan semua jenis obat-obat tertentu dan obat yang mengandung zat psikotropika yang dimiliki setiap bulanya ke BPOM. Apotek juga tidak boleh sembarangan memberikan dosis kepada paies yang menderikan penyakit tertentu dan dianjurkan oleh dokter untuk mengkonsumsi obat-obat tertentu untuk penyembuhan, biasanya apotek akan menanyakan resep dari dokter dan riwayat jurnal kontrol pasien sebelum memberikan obat.

Dari hasil wawancara yang diperoleh penulis, pengawasan terhadap peredaran Obat-obat keras telah dilakukan oleh Apotek sebagai pihak yang mendistribusi telah berusaha keras dalam menekan peredaran obat keras secara sembarangan di masyarakat. Hal ini dijelaskan dalam permenkes nomor 72 tahun 2016 dimana menerangkan mengenai pelayanan kefarmasian yang mana langsung bertanggung jawab kedap pasien yang berkaitan langsung dengan sediaan farmasi dengan maksud meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Dalam hal penerbitan izin, BPOM memiliki peran yang sentral dalam peredaran obat dan makanan, BPOM sebagai lembaga Pemerintahan Non Departemen yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya BPOM mempunyai unit pelaksana teknis salah satunya berbentuk Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai besar POM). Balai POM memiliki tugas untuk melaksanakan tugas pemerintah dibidang pengawasan produk terapeutic, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya

Dasar hukum mengenai tugas dan fungsi Balai POM terdapat dalam Peraturan Presiden No 80 tahun 2017 pasal 3, hal ini diatur dalam melaksanakan tugasnya BPOM mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan.
- b. Pelaksanaan kebijakan nasional dibidang pengawasan dan makanan
- c. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar
- d. Pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar
- e. koordinasi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah.
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan obat dan makanan.
- g. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang undangan dibidang pengawasan obat dan makanan
- h. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan BPOM
- i. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM
- j. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM

Bagi oknum pengedar, sanksi yang didapatkan sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan tepatnya dalam pasal 190 sampai dengan pasal 201 ialah:

- a. Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat (pasal 190)

- b. Setiap orang yang tanpa izin melakukan praktik pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) sehingga mengakibatkan kerugian harta benda, luka berat atau kematian (pasal 191)
- c. Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun (pasal 192)
- d. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan bedah plastik dan rekonstruksi untuk tujuan mengubah identitas seseorang (pasal 193)
- e. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan (pasal 194)
- f. Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan darah dengan dalih apapun (pasal 195)
- g. Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak/memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu (pasal 196)
- h. Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar (pasal 197)
- i. Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian (pasal 198)
- j. Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau memasukkan rokok ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 (pasal 199)
- k. Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi program pemberian air susu ibu eksklusif (pasal 200)

Sementara itu pemberian sanksi kepada pedagang obat yang diketahui telah melanggar ketentuan perizinan obat-obat tertentu akan mendapatkan sanksi administrasi yang berupa : peringatan; peringatan keras; penghentian sementara kegiatan; pembatalan persetujuan izin edar; rekomendasi pencabutan pengakuan PBF cabang; dan/atau rekomendasi pencabutan izin.

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Bedasarkan pemaparan dan hasil penelitian oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan : Obat Keras (Berlogo K dikemasan) golongan psikotropika tidak boleh beredar sembarangan di masyarakat, hal ini disebabkan karena efek obat keras dapat membahayakan apabila dikonsumsi secara sembarangan. Peredaran

Obat keras Golongan Psikotropika memiliki pendistribusiannya hanya boleh diberikan kepada pasien yang benar-benar membutuhkan. Apabila hendak membutuhkan haruslah dibuktikan dengan adanya surat resep dari dokter yang telah merekomendasikan. Dalam fakta wawancara ditemukan golongan obat yang memiliki efek psikotropika tetapi tidak masuk dalam kategori Obat psikotropika, melainkan golongan obat ini diatur diperaturan tersendiri yaitu PerBPOM no 28 Tahun 2018 tentang Obat-Obat Tertentu. Golongan obat ini disendirikan karena dalam peredaranya diperbolehkan asalkan dalam takaran dosis tertentu.

Penerapan izin terhadap peredaran obat generik yang mengandung zat psikotropika yang dimiliki oleh Apotek Surakarta Farma telah sesuai dengan undang-undang no 5 tahun 1997. Begitu juga dengan golongan obat-obat tertentu yang ada, telah sesuai dengan PerBPOM no 28 Tahun 2018 tentang Obat-Obat Tertentu. Proses pemeriksaan obat-obat tertentu dilakukan oleh pihak apotek dengan cara melakukan pendataan rutin setiap bulan, pendataan dimulai dari saat jumlah obat keras yang disalurkan kepada apotek hingga pendataan akhir setiap ada obat yang terjual kemudian data yang telah tervalidasi dikirim kembali ke BPOM .

Peredaran obat ilegal dimasyaakat dapat menjadi faktor pendorong untuk melakukan tindak kejahatan, khususnya untuk masyarakat ekonomi menengah. Karena efek kecanduan yang disebabkan oleh zat psikotropika ini mendorong oknum pecandu untuk melakukan cara apa saja untuk mendapatkan uang yang akan digunakan untuk mendapatkan obat yang diinginkan tidak terkecuali dengan melakukan tindak kejahatan.

4.2. Saran

Berdasarkan penjelasan kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang ada dalam penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa saran rekomendasi untuk meningkatkan kualitas penelitian selanjutnya: Untuk Apotek dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat umum tentang obat generik agar dapat memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat mengenai obat-obatan. Untuk masyarakat diharapkan lebih bijaksana dalam menggunakan obat-obat generik, mengedukasi diri dan lebih cermat lagi dalam membeli obat-obat generik.

DAFTAR PUSTAKA

Asyhadie, A.Zaeni. (2017). *Aspek-aspek hukum Kesehatan*. Depok: Rajawali Perss.

<https://radarsolo.jawapos.com/read/2019/09/06/154470/awas-resep-palsu-untuk-beli-obat-keras> diakses pada 01/04/2021

<https://www.pom.go.id/new/> diakses pada 01/04/2021

Notoatmodjo, Soekidjo. (2010). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineke Cipta.

Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang

PerBPOM No 28 Tahun 2018 tentang OOT (Obat-obat tertentu)

Permenkes nomor 72 tahun 2016

Suratman dan Dillah, Philip. (2013). *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.

Undang-undang Kesehatan no 36 Tahun 2009

Universitas Sanata Dharma, *Praktik kefarmasian ulasan peraturan tentang bidang pekerjaan apoteker* hal 3-5, penerbit jl affandi,gejayan yogyakarta